



## **Peran BUMDes Dalam Mendukung SDGs di Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis**

**Muhamad Ilham Firdaus<sup>1</sup>, Regi Refian Garis<sup>2</sup>, Asep Nurdin Rosihan Anwar<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh, Ciamis

Email: muhamad\_ilham02@student.unigal.ac.id

Received: 29-07-2024

Accepted: 01-09-2024

Published: 24-09-2024

### **Abstract**

*Sustainable Development Goals (SDGs) is the government's effort to reduce poverty and improve community welfare. One way to achieve this goal is through the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes). BUMDes is a tool to improve the economy and welfare of village communities. The aim of this research is to determine the role of Village-Owned Enterprises in supporting the achievement of the objectives of the Sustainable Development Goals program in Sindangsari Village, Cikoneng District, Ciamis Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method. Data was obtained in this research through observation, documentation and interviews with 11 informants, namely the village head, village secretary, BPD chairman, BUMDes director, BUMDes secretary, BUMDes supervisor, and 5 community leaders. The results of the research show that two of the five role indicators according to Siagian have not worked optimally, including the role as a pioneer and as an implementer himself. So it can be concluded that the role of BUMDes Bhinekasari Mandiri in supporting the Sustainable Development Goals (SDGs) has not gone well.*

**Keywords:** *Sustainable Development Goals; BUMDes; Role*

### **Abstrak**

Pembangunan berkelanjutan atau disebut juga dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan salah satu alat untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa dalam mendukung tercapainya tujuan dari program *Sustainable Development Goals* di Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui observasi, dokumentasi dan wawancara kepada 11 orang informan, yaitu kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, direktur BUMDes, sekretaris BUMDes, pengawas BUMDes, dan 5 orang tokoh masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa dua dari lima indikator peran menurut Siagian belum berjalan secara optimal, diantaranya yaitu peran sebagai pelopor dan sebagai pelaksana sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran BUMDes Bhinekasari Mandiri dalam mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)* belum berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** *Sustainable Development Goals, BUMDes, Peran*

## **PENDAHULUAN**

*Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Pembangunan Berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan pembangunan di negara ini. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengurangi kemiskinan melalui dana desa. SDGs Nasional mencakup 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut diantaranya yaitu bebas kemiskinan dan kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, setaranya gender, sanitasi dan air bersih, kemajuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja meningkat serta pekerjaan yang layak bagi semua masyarakat (Triatmanto, 2021).

Suatu masalah pembangunan di pedesaan adalah pertanian. Pertanian menjadi sorotan utama dalam proses pembangunan. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa sebagian besar masyarakat di Negara-negara berkembang yang masih tinggal di pedesaan dan bergelut disektor pertanian memiliki kondisi taraf dikehidupan yang rendah Sehingga, sangat penting untuk dipastikan keberhasilan SDGs Nasional terutama dalam mendorong pembangunan di wilayah pedesaan (Mahfudhoh & Selfia, 2023). Pendekatan yang dianggap penting dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Yuliana & Alinsari, 2022).

BUMDes berperan sebagai lembaga sosial dengan fokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan layanan sosial. Sementara itu, sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan dengan menawarkan sumber daya lokal ke pasar (David, 2018). BUMDes merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuannya yaitu untuk mengelola aset, menyediakan jasa pelayanan, dan menjalankan usaha lainnya

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Langkah tersebut sesuai dengan tujuan dari program *Sustainable Development Goals* yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Baderan & Napu, 2020; Mahfudhoh & Selfia, 2023).

Dalam penelitiannya (Yuliana & Alinsari, 2022) menyatakan bahwa keberadaan BUMDes memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dengan adanya unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes berperan signifikan dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, sehingga mendukung pencapaian tujuan *SDGs* di tingkat desa, khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Peran BUMDes dalam mendukung pencapaian *SDGs* di tingkat desa memiliki dampak yang sangat berarti pada pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembentukan kemitraan, dan inovasi di wilayah desa (Mahfudhoh & Selfia, 2023). Perkembangan unit usaha BUMDes merupakan salah satu pendorong utama dalam menggerakkan perekonomian melalui berbagai unit usaha yang dikelolanya. Unit-unit usaha ini meningkatkan peluang pekerjaan yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan *SDGs* terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Namun, kurangnya pemahaman sumber daya manusia yang disebabkan oleh mindset yang masih rendah, menyebabkan mereka kesulitan mengidentifikasi BUMDes sebagai potensi sumber penghasilan, hal ini menjadi salah satu hambatan yang menghambat pencapaian tujuan dan pengembangan BUMDes (Napitupulu, Rajagukguk, & Pasaribu, 2022).

Melalui BUMDes, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi mereka mengenai jenis usaha yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Namun, sayangnya beberapa desa menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan desa, yang mengakibatkan kesulitan dalam menentukan jenis usaha atau kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan potensi masyarakat serta sumber daya manusia yang belum memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor lain yang

dihadapi dalam menjalankan usaha melibatkan kekurangan modal, sarana, dan prasarana, yang dapat menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat desa.

BUMDes Bhinekasari Mandiri merupakan BUMDes yang ada di Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Jawa Barat yang telah berdiri sejak tahun 2014. Dalam observasi studi pendahuluan ditemukan fakta bahwa BUMDes Bhinekasari Mandiri mengelola beberapa unit usaha, yaitu unit usaha PAM desa dan depot isi ulang air minum, unit usaha penyewaan peralatan dan mesin seperti mesin molen, stemper, sprayer aspal, roda artco serta peralatan bahan bangunan, unit usaha penyewaan kios, ATK dan *Foto Copy*, dan BRllink.

Keberhasilan BUMDes dalam menjalankan peran memiliki dampak positif yang signifikan pada peningkatan perekonomian suatu desa. Untuk mengidentifikasi peran BUMDes terdapat lima indikator peran pemerintah dalam pembangunan nasional menurut (Siagian, 2012) yaitu peran sebagai stabilitator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri. Dari lima indikator tersebut, diharapkan BUMDes dapat menjadi penggerak ekonomi desa yang memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran BUMDes dalam mendukung *Sustainable Development Goals*.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang diharapkan dapat fokus pada realitas atau kejadian yang terjadi dalam konteks yang sedang diselidiki (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Fokus utama dalam pendekatan kualitatif adalah validitas data, yaitu sejauh mana catatan data mencerminkan apa yang benar-benar terjadi dalam konteks yang

sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang realitas peran pemerintah desa melalui BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat menggunakan lima indikator peran yang diusulkan oleh (Siagian, 2012) yaitu peran pemerintah sebagai stabilitator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri.

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan yaitu dari bulan Januari sampai bulan Juni 2024 di BUMDes Bhinekasari Mandiri Desa Sindangsari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui pengumpulan data secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dengan melibatkan banyak pihak, seperti mengambil data dari kantor lembaga atau perusahaan (Barlian, MS, 2016; Sugiyono, 2020).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara bersama 11 informan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua PBD, Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes, Pengawas BUMDes, Perwakilan Kepala Dusun, Perwakilan Ketua RT dan RW, serta 2 orang tokoh masyarakat. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil studi pustaka, studi lapangan, observasi dan dokumentasi desa. Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Model analisis interaktif terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Desa Sindangsari merupakan sebuah Desa yang berada diwilayah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis yang terdiri dari 6 Dusun yaitu Dusun Jetak, Dusun Colendra, Dusun Sukahurip, Dusun Kalapanunggal, Dusun Setiamulya dan Dusun Singkup. Seluruh Masyarakat di Desa Sindangsari merupakan warga Negara Indonesia dan suku Sunda. Berdasarkan data laporan kependudukan pada bulan April tahun 2024 tercatat bahwa penduduk di Desa Sindangsari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis berjumlah sebanyak 7.949 jiwa yang diantaranya adalah 4.068 penduduk laki-laki dan 3.882 penduduk Perempuan serta terdapat 2.561 kepala keluarga (KK).

Secara umum wilayah Desa Sindangsari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis memiliki luas 492,750 Ha yang terdiri dari wilayah perbukitan dan pegunungan, Wilayah tersebut dijadikan sebagai sarana pencaharian masyarakat, sarana pengembangan potensi sumber daya manusia dan sarana lain yang menunjang kehidupan masyarakat. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Desa Sindangsari adalah banyaknya sumber air bersih sehingga suplay air bersih untuk kebutuhan penduduk selalu terpenuhi. Potensi ini dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk Desa Sindangsari sebagai sarana mata pencaharian yang dapat menunjang kehidupannya. Rata-rata penduduk Desa Sindangsari memiliki profesi sebagai buruh tani, petani, buruh industri atau pekerja pabrik dan buruh bangunan. Berikut penulis uraikan profesi atau mata pencaharian penduduk Desa Sindangsari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis.

**Tabel 1: Penggolongan Penduduk Desa Sindangsari Berdasarkan Profesi**

No.	Profesi/Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1.	Petani	1708
2.	Buruh Tani	1735
3.	Pengusaha Industri	9
4.	Buruh Industri	303
5.	Buruh Bangunan	234
6.	Pedagang/Wiraswasta	137
7.	Peternak	18
8.	PNS	55

9.	TNI/POLRI	5
10.	Karyawan Swasta	175
11.	Pensiunan	43
12.	Lainnya	70

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Sindangsari Maret 2024

Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis telah mengembangkan upaya dalam sektor ekonomi dan pelayanan umum dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun 2014 yang diberi nama BUMDes "Bhinekasari Mandiri". BUMDes diurus dan dipimpin oleh pelaksanaan operasional yang diangkat dari orang perorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa. Pelaksanaan operasional BUMDes yang ditetapkan di Desa Sindangsari Tahun 2024 ini terdiri dari :

1. Direktur BUMDes
2. Sekertaris BUMDes
3. Bendahara BUMDes

## **PEMBAHASAN**

Analisi dalam penelitian ini menggunakan teori lima indikator peran pemerintah dalam pembangunan menurut (Siagian, 2012) sebagai berikut:

### **1. Peran BUMDes Selaku Stabilitor**

Pemerintah sebagai stabilitor dianggap sebagai agen yang bertanggung jawab untuk mencegah perubahan yang dapat mengakibatkan gejolak sosial dan potensi ancaman terhadap keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Pencapaian peran ini melibatkan berbagai metode, termasuk kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang efektif, pendidikan, pendekatan persuasif, dan pendekatan bertahap namun berkesinambungan.

BUMDes Bhinekasari Mandiri merupakan BUMDes yang ada

di Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Jawa Barat yang telah berdiri sejak tahun 2014, mengelola beberapa unit usaha, yaitu unit usaha PAM desa, unit usaha penyewaan peralatan dan mesin seperti mesin molen, stemper, sprayer aspal, roda artco serta peralatan bahan bangunan, unit usaha penyewaan kios, ATK dan *Foto Copy*, dan BRILink.

Dalam mengamankan stabilitas pertumbuhan ekonomi BUMDes Bhinekasari Mandiri telah memiliki unit usaha yang memiliki penghasilan stabil dalam setiap bulannya untuk pendapatan desa melalui unit usaha pelayan air bersih PAMDesa selain itu BUMDes memiliki upaya untuk menciptakan kemajuan ekonomi yang stabil dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan potensi desa yang dilaksanakan sedikitnya 1-2 kali dalam satu tahun sehingga dapat meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan masyarakat, selain itu melakukan pelatihan dan peremajaan untuk pegawai BUMDes untuk menambah tenaga ahli pengelola BUMDes dan meningkatkan kualitas kinerja pegawai BUMDes.

Peran pemerintah selaku stabilitator adalah mewujudkan perubahan yang tidak merubah gejolak sosial yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan. Peran tersebut dapat terwujud dengan dilakukannya berbagai cara, antara lain melalui kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan dan pendekatan persuasive. Perekonomian yang stabil merupakan perekonomian yang sudah terpelihara dengan sedemikian rupa sehingga dapat tumbuh secara wajar, memiliki suku bunga yang tidak tinggi, rendahnya inflasi, memiliki kesempatan berusaha semakin luas dan proses industrialisasi berlangsung dengan baik dan menguntungkan(Siagian, 2012).

Teori tersebut menyatakan bahwa peran pemerintah sebagai

stabilitator telah optimal jika dapat mewujudkan perubahan yang baik dan tidak menjadikan suatu ancaman bagi keutuhan, kesatuan dan persatuan sosial masyarakat melalui berbagai cara. BUMDes Bhinekasari Mandiri melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk menciptakan kemajuan ekonomi yang stabil adalah melalui proses sosialisasi yang didalamnya menyampaikan sebuah edukasi atau pendidikan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat. Selain sosialisasi tersebut juga melakukan pelatihan kepada tenaga kerja atau pegawai BUMDes untuk meningkatkan kualitas kinerja BUMDes. Upaya tersebut merupakan suatu pendekatan persuasive kepada masyarakat dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

## **2. Peran BUMDes Selaku Inovator**

Sebagai inovator, pemerintah diharapkan menjadi sumber ide baru dan perubahan. Keberhasilan dalam memainkan peran ini tergantung pada tingkat legitimasi pemerintahan. Pemerintahan dengan tingkat keabsahan rendah cenderung kesulitan mengenalkan inovasi kepada masyarakat. Faktor kunci mencakup penerapan inovasi di dalam birokrasi terlebih dahulu, jenis inovasi seperti konseptual, sistemik, prosedural, dan metode kerja.

BUMDes Bhinekasari Mandiri selalu memiliki ide-ide dalam menciptakan usaha baru atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Dalam menciptakan suatu inovasi BUMDes Bhinekasari Mandiri harus melakukan reset masalah yang sedang dihadapi dan menjadikan inovasi sebuah solusi untuk menangani tersebut. Seperti inovasi yang akan diimplementasikan oleh BUMDes Bhinekasari Mandiri saat ini yaitu membuat sebuah aplikasi android sebagai catatan digital penggunaan PAMDesa. Inovasi tersebut tercipta dari adanya suatu hambatan dan dijadikan solusi untuk kelancaran jalannya unit usaha PAMDesa. Salah satu usaha dalam menciptakan inovasi tersebut BUMDes melakukan pelatihan untuk tenaga kerja yang diharapkan dapat meningkatkan

keterampilan dan produktivitas dalam menciptakan suatu inovasi.

Sejalan dengan teori (Siagian, 2012) yang menyatakan bahwa inovasi adalah suatu produk dari kreativitas dan merupakan temuan baru, metode baru, sistem baru serta cara berpikir baru. Dalam menjalankan peran sebagai inovator pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi, sehingga saat memperkenalkan suatu pemikiran atau ide-ide baru akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat agar dapat terjadi perubahan yang diinginkan. Peran sebagai inovator akan optimal apabila memiliki keinginan untuk meneliti dan mendiagnosis masalah, kemudian mencari jalan keluarnya menggunakan rasio dan pendekatan yang bersifat ilmiah, sehingga “terapi” yang digunakan tidak hanya mampu “mengobati” gejala-gejala yang timbul tetapi dapat menghilangkan faktor-faktor penyebab hingga ke akarnya.

### **3. Peran BUMDes Selaku Modernisator**

Dalam konteks pembangunan, setiap negara berharap untuk menjadi kuat, mandiri, dan setara dengan negara-negara lain. Pemerintah dianggap memiliki peran sebagai modernisator dengan cara menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan manajerial, pemanfaatan sumber daya alam dengan nilai tambah tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal, dan visi jelas tentang masa depan.

BUMDes Bhinekasari Mandiri dalam menunjukkan kemampuan dalam mengelola kekayaan alam di Desa Sindangsari melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara pengelolaan potensi desa. Selain itu, diadakan suatu pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai BUMDes dalam menciptakan inovasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan sistem pengelolaan unit usaha BUMDes Bhinekasari Mandiri saat ini telah menggunakan pencatatan dan pelayanan secara digital dalam pelaksanaannya. Sistem tersebut telah berjalan baru-baru ini,

karena butuh pelatihan dan pemahaman yang ekstra untuk mewujudkan hal tersebut yang disebabkan oleh terbatasnya tenaga kerja atau pegawai BUMDes.

Dalam meningkatkan kemandirian ekonomi dan menggali kreativitas melalui sumber daya untuk mewujudkan pembangunan dan kehidupan masyarakat yang modern BUMDes Bhinekasari Mandiri melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan serta kualitas sumber daya manusia di Desa Sindangsari. Selain itu, diadakannya pelatihan dan peremajaan untuk pegawai BUMDes Bhinekasari Mandiri agar dapat meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki pengetahuan guna mengimbangi perkembangan teknologi saat ini. Sehingga diharapkan mampu mengelola potensi yang dimiliki desa secara kreatif dan inovatif.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Siagian, 2012) yang menyatakan bahwa Pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat ke arah kehidupan yang modern. Dalam mewujudkan peran pemerintah sebagai modernisator diperlukan beberapa upaya yaitu penguasaan Ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kemampuan dan kemahiran managerial, kemampuan mengolah kekayaan alam, sistem pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan yang demokratis, memiliki visi yang jelas untuk masa depan, rakyat yang diberdayakan, kesediaan mengambil risiko, orientasi masa depan dan bersedia menerima perubahan. Modernisasi tidak akan terwujud dengan sendirinya, dalam mewujudkannya diperlukan pembangunan yang sistematis, pragmatis dan berkelanjutan.

Kesesuaian tersebut dapat diketahui dari adanya beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BUMDes Bhinekasari Mandiri antara lain sebagai berikut:

a. BUMDes Bhinekasari Mandiri dalam meningkatkan pengetahuan

dan kemampuan tenaga kerja khususnya dalam bidang teknologi melalui sosialisasi dan pelatihan,

- b. Pegawai BUMDes memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai pengelolaan BUMDes.
- c. BUMDes memiliki unit usaha yang diciptakan melalui pengeolaan kekayaan alam atau potensi yang tersedia di Desa Sindangsari.
- d. BUMDes mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
- e. BUMDes membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.
- f. Dapat menciptakan suatu inovasi yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan BUMDes menjadi lebih baik dimasa depan.

#### **4. Peran BUMDes Selaku Pelopor**

Pemerintah diharapkan menjadi panutan bagi masyarakat melalui tindakan positif seperti kepeloporan dalam produktivitas kerja, penegakan keadilan dan kedisiplinan, kepedulian terhadap lingkungan, budaya, dan sosial, serta pengorbanan demi kepentingan negara.

Dalam menjalankan perannya sebagai pelopor BUMDes Bhinekasari Mandiri belum berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan kurang efektifnya pengelolaan BUMDes karena kurangnya tenaga kerja ahli yang mengelola BUMDes. Selain itu, karena adanya kinerja yang kurang baik dalam pengelolaan keuangan BUMDes sebelumnya menjadikan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan koordinasi langsung BUMDes Bhinekasari Mandiri kepada masyarakat untuk menciptakan pembangunan belum berjalan secara efektif, sehingga diperlukan manajemen pengelolaan yang efektif agar dapat melakukan koordinasi langsung bersama masyarakat.

Berdasarkan teori menurut (Siagian, 2012) menyatakan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai pelopor pemerintah harus menjadi panutan "role model" bagi seluruh masyarakat dengan beberapa cara, misalnya dengan kepeloporan dalam bekerja produktif, kepeloporan dalam kejujuran, kepeloporan dalam menegakan kedisiplinan, kepeloporan dalam ketaatan kepada peraturan undang-undang, kepeloporan dalam bersedia berkorban, kepeloporan dalam kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, kepeloporan dalam penerapan objektivitas dan kepeloporan dalam meningkatkan efisiensi. Peran pemerintah sebagai pelopor akan mempengaruhi masyarakat dalam mengubah pandangannya, persepsi, cara berpikir, cara bertindak dan cara bekerjanya yang pada gilirannya pasti akan melancarkan jalannya pembangunan.

## **5. Peran BUMDes Selaku Pelaksana Sendiri**

Meskipun pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagian besar menjadi tanggung jawab nasional, pemerintah diakui memiliki kewajiban untuk melaksanakan sendiri beberapa kegiatan yang tidak dapat diserahkan kepada sektor swasta. Alasan-alasan termasuk pertimbangan keamanan nasional, keterbatasan modal, kemampuan yang belum memadai, kurangnya minat dari masyarakat, dan tugas konstitusional yang melekat pada pemerintah.

BUMDes Bhinekasari Mandiri memiliki pegawai atau tenaga kerja terbatas sehingga dalam menjalankan program kerja dan pembangunan BUMDes masih kurang optimal. Dalam menangani hal tersebut terdapat beberapa upaya untuk menjalankan rencana kerja BUMDes Bhinekasari Mandiri untuk masa depan yaitu dengan menambah tenaga kerja serta melakukan pembinaan kepada tenaga kerja atau pengelola BUMDes melalui pelatihan dan penyuluhan guna meningkatkan kualitas kinerja pegawai sehingga diharapkan pegawai mampu melaksanakan program kerja dengan tepat dan

optimal. Keterbatasan tersebut dibuktikan salah satunya melalui pengelolaan unit usaha yang ada misalnya pada unit usaha pelayanan air minum kemasan yaitu isi ulang galon dalam pelaksanaannya masih sangat membutuhkan tenaga kerja. Karena pegawai sama driver yang mengantar galon adalah orang yang sama jadi pengelolaan belum dapat efektif dan efisien.

Berdasarkan teori yang dikemukakan (Siagian, 2012) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata. Namun, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang kurang memadai dan kegiatan tidak bisa diserahkan kepada pihak lain sehingga harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Untuk mewujudkan peran pemerintah sebagai pelaksana sendiri dalam pembangunan, salah satu aspek terpenting adalah pembangunan administrasi.

Berdasarkan teori tersebut dapat diketahui bahwa peran BUMDes sebagai pelaksana sendiri merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh BUMDes sendiri dan tidak bisa diwakilkan oleh pihak lain, salah satunya adalah program kerja tahunan BUMDes. BUMDes Bhinekasari Mandiri dalam melaksanakan perannya sebagai pelaksana sendiri belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya tenaga kerja ahli yang mengelola BUMDes sehingga administrasi pembangunan BUMDes belum dapat terlaksana secara optimal. Namun, BUMDes Bhinekasari Mandiri memiliki upaya dalam menjalankan rencana kerja BUMDes untuk masa depan menjadi semakin baik dan dapat berjalan secara optimal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari Peran BUMDes Bhinekasari Mandiri dalam mendukung *Sustainable Development Goal* (SDGs) di Desa Sindangsari dapat dilihat dari adanya

optimalisasi 5 indikator peran menurut (Siagian, 2012) yaitu stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri.

BUMDes Bhinekasari Mandiri telah menjalankan perannya dengan optimal dalam aspek stabilisator, inovator, dan modernisator. Namun, dalam menjalankan peran sebagai pelopor dan pelaksana secara sendiri, BUMDes Bhinekasari Mandiri masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga kerja ahli dalam mengelola keuangan BUMDes sehingga manajemen keuangan BUMDes belum terkelola secara maksimal, serta terbatasnya tenaga kerja dalam pengelolaan BUMDes yang menyebabkan lambatnya BUMDes dalam mewujudkan program kerja serta ide-ide dan pemikiran baru.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Baderan, U. S., & Napu, B. (2020). Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ayuhula Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 3(2), 66. <https://doi.org/10.31314/jsap.3.2.66-72.2020>
- Barlian, MS, P. D. E. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (S. dan J. Sumiati, ed.). Padang: Sukabina Press.
- David, W. (2018). *Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gave Media.
- Mahfudhoh, & Selfia, Y. (2023). PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM Mendukung SDGs DESA DI KABUPATEN LAMONGAN. *Jurnal Kelithangan Kabupaten Lamongan*, 6(1), 16–21. Retrieved from <https://e-jurnal.lamongankab.go.id/index.php/e-jurnal/article/view/66/61>
- Napitupulu, M. D., Rajagukguk, J., & Pasaribu, V. A. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA MELALUI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). *Citra Sosial Humaniora (CISHUM)*, 1(2), 130–148. Retrieved from <https://publisher.yccm.or.id/index.php/cishum/index>
- Rohaeti, A. (2013). *Ekonomi Pembangunan Perdesaan dan Agribisnis*.

Bandung: CV Kalam Media.

Siagian, S. (2012). *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Triatmanto, B. (2021). *Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goal's (SDG's)*. Malang: Penerbit Selaras. Retrieved from <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=-mU4EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA89&dq=pengentasan+kemiskinan+bappeda&ots=aS9dipnSeF&sig=Uj9B7loBdaaAoA8FZpYAXvZTQ4U>

Yuliana, E., & Alinsari, N. (2022). Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. *Owner*, 6(3), 2789–2799. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.945>